



# LAPORAN KEGIATAN

OECD BRIEFING OF ECONOMIC SURVEY OF INDONESIA

TANGERANG - BANTEN

21 MARET 2021



**BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**



**LAPORAN PELAKSANAAN**  
**BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
***OECD BRIEFING OF ECONOMIC SURVEY OF INDONESIA***  
**Tangerang - Banten**  
**23 March 2021**

**I. PENDAHULUAN**

**A. PENGANTAR**

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) merupakan organisasi antar-pemerintah yang fokus kepada isu-isu ekonomi dan beranggotakan 37 negara. Organisasi ini didirikan pada tahun 1961 yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia. Fokus utama negara-negara anggota OECD adalah menyediakan sarana bertukar pengalaman dan informasi. Mencari solusi permasalahan bersama, dan koordinasi kebijakan nasional dan internasional negara-negara anggota.

OECD melaksanakan survei ekonomi tahunan negara-negara di dunia. Indonesia, walaupun bukan anggota OECD juga tidak luput dari survei tersebut. Berdasarkan kajian yang diterbitkan pada tahun ini, terdapat beberapa rekomendasi yang dihasilkan, antara lain: 1. Beralih dari manajemen krisis menuju pencapaian pemulihan; 2. Meningkatkan efektifitas intervensi pemerintah; 3. Mempercepat transisi hijau; dan 4. Memperluas keterampilan dan kesejahteraan. Terkait survei dan rekomendasi tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendapatkan undangan untuk memberikan masukan dan pendapatnya terkait survey tersebut yang diselenggarakan di Bogor pada tanggal 21 April 2021.

## B. SUSUNAN DELEGASI

NO	NAME	COMMISSION	POSITION
1.	Dr. Fadli Zon	<i>Commission on Defence, Foreign Affairs, and Information (I)</i>	<i>Chair of the Interparliamentary Cooperation Committee</i>
2.	Dr. Sihar Sitorus	<i>Commission on Finance (XI)</i>	<i>Vice Chair of the Interparliamentary Cooperation Committee</i>
3.	Mr. Putu Supadma Rudana	<i>Commission on Trade, Investment, and Industrial Affairs (VI)</i>	<i>Vice Chair of the Interparliamentary Cooperation Committee</i>
4.	Dr. Mardani Ali Sera	<i>Commission on Home Affairs (II)</i>	<i>Vice Chair of the Interparliamentary Cooperation Committee</i>
5.	Mr. Achmad Hafizs Tohir	<i>Commission on Finance (XI)</i>	<i>Vice Chair of the Interparliamentary Cooperation Committee</i>
6.	Mrs. Irine Yusiana Roba Putri	<i>Commission on Education, Tourism, and Cultural Affairs (X)</i>	<i>Member of the Interparliamentary Cooperation Committee</i>
7.	Mr. I Made Urip	<i>Commission on Agricultural, Plantation, and Forestry (IV)</i>	<i>Member of the Interparliamentary Cooperation Committee</i>
8.	Mr. Mochmad Ichsan Firdaus	<i>Commission on Agricultural, Plantation, and Forestry (IV)</i>	<i>Member of the Interparliamentary Cooperation Committee</i>

			<i>Cooperation Committee</i>
9.	Mr. Adrian Jopie Paruntu	<i>Commission on Education, Tourism, and Cultural Affairs (X)</i>	<i>Member of the Interparliamentary Cooperation Committee</i>
10.	Mrs. Himmatul Aliyah	<i>Commission on Education, Tourism, and Cultural Affairs (X)</i>	<i>Member of the Interparliamentary Cooperation Committee</i>
	Mr. Abdullah Tuasikal	<i>Commission on Agricultural, Plantation, and Forestry (IV)</i>	<i>Member of the Interparliamentary Cooperation Committee</i>
10.	Mr. Hasani Bin Zubeir	<i>Commission on Religious, Social, and Women Empowerment (VIII)</i>	<i>Member of the Interparliamentary Cooperation Committee</i>
11.	Mr. Syahrul Aidii Maazat	<i>Commission on Communication, Telecommunication, and Public Work (V)</i>	<i>Member of the Interparliamentary Cooperation Committee</i>
12.	Mr. Asman Abnur	<i>Commission on Energy, Mineral Resources, and Environmental Affairs (VII)</i>	<i>Member of the Interparliamentary Cooperation Committee</i>
13.	Mr. Muhammad Iqbal	<i>Commission on Defence, Foreign Affairs, and Information (I)</i>	<i>Member of the Interparliamentary Cooperation Committee</i>

### C. VISI DAN MISI DELEGASI

- Mendapatkan gambaran besar terkait hasil survey ekonomi Indonesia yang diselenggarakan oleh OECD.
- Memberikan pandangan/ide Indonesia terkait hasil survey tersebut.
- Bertukar pengalaman dan pencapaian Indonesia terkait perekonomian nasional terutama terkait fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dimiliki oleh DPR RI.

### D. PERSIAPAN PELAKSANAAN TUGAS

Materi yang dijadikan referensi bagi Pimpinan dan Anggota BKSAP diolah oleh Tenaga Ahli dan Sekretariat KSI BKSAP berupa Pidato dan Saran Butir Wicara.

## II. ISI LAPORAN

### A. AGENDA ACARA

14.30 – 14.35	Opening remarks by <b>Dr. Sihar Sitorus</b> , Vice Chair of the Committee for Interparliamentary Cooperation
14.35 – 14.40	Welcoming and Introduction by <b>Carol Guthrie</b> , OECD Head of Public Affairs and Media
	Presentations on Economics Survey of Indonesia, by:
14.40 – 15.00	1. <b>Andrea Goldstein</b> , Head of the Indonesia Desk, OECD Economics Department 2. <b>Robert Grundke</b> , OECD Indonesia Desk Economist
15.00 – 15.40	Questions & Answers moderated by <b>Dr. Sihar Sitorus</b>
15.40 – 15.45	Closing remarks by <b>Dr. Fadli Zon</b> , Chair of the Committee for Interparliamentary Cooperation
15.45 – 15.50	Closing remarks from <b>Carol Guthrie</b> , OECD Head of Public Affairs and Media

## B. SITUASI UMUM

**Dr. Sihar Pangihutan Hamonangan Sitorus Pane, BSBA, MBA**, Wakil Ketua BKSAP, membuka acara dengan menyampaikan gambaran mengenai kondisi ekonomi Indonesia di masa pandemi. Pandemi menyerang semua negara termasuk Indonesia. Di tahun 2019 banyak yang memproyeksikan Indonesia akan menikmati pertumbuhan 5% pada tahun 2020. Namun hanya dalam beberapa bulan saja, perekonomian Indonesia mengalami kontraksi dan jatuh ke angka minus.



**Dr. Sihar Sitorus (F-PDIP), Wakil Ketua BKSAP membuka *briefing* bersama OECD. Beliau didampingi oleh Dr. Mardani Ali Sera (F-PKS), Wakil Ketua BKSAP, dan A. Hafisz Tohir (F-PAN), Wakil Ketua BKSAP**

Berbagai langkah cepat diambil Indonesia setelah penularan COVID-19. Pertama, selain melakukan pembatasan pergerakan sosial, Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia terus berkoordinasi untuk mencegah keterpurukan ekonomi. UU No. 1/2020 mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Penanganan Pandemi COVID-19 menjadi payung hukum komprehensif kebijakan keuangan yang lebih tangguh dan sekaligus melindungi masyarakat miskin dan paling rentan.

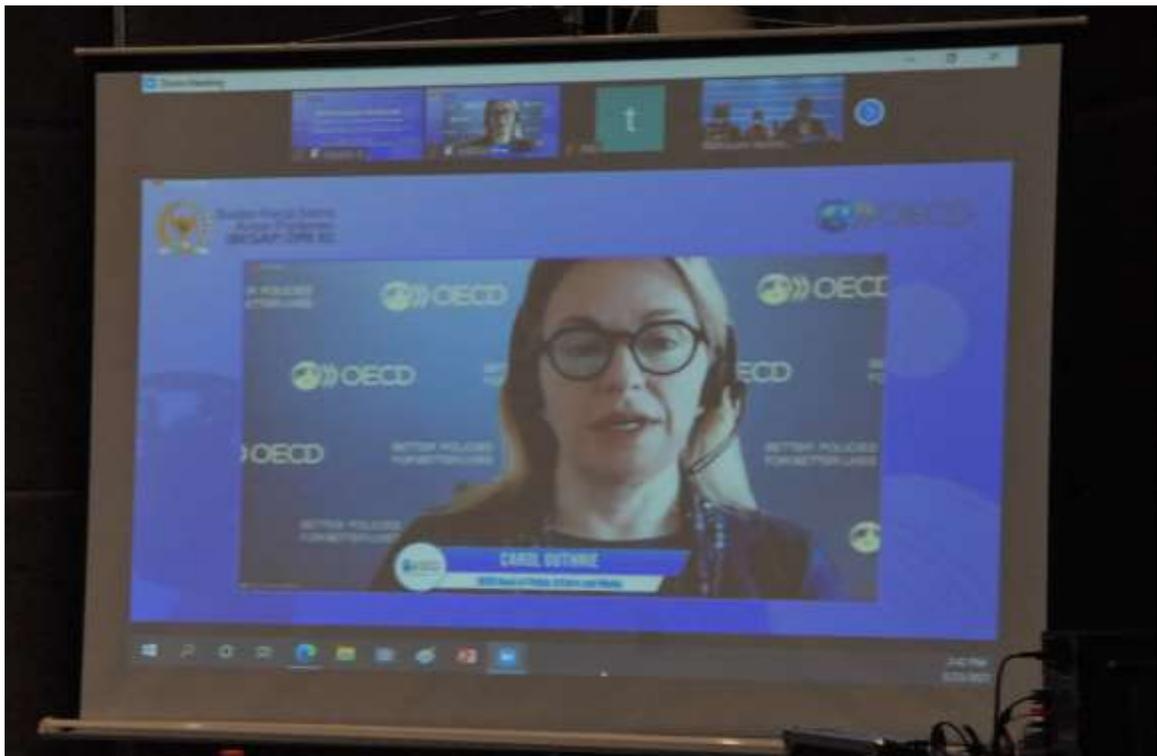


**Anggota BKSAP, Irine Yusiana Roba Putri (F-PDIP), Himmatul Aliyah (F-Gerindra), dan Hasani bin Zubeir (F- PD) hadir pada brifing OECD**

Pekan lalu Bappenas/Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional memproyeksikan dalam skenario vaksinasi saat ini, pertumbuhan ekonomi diharapkan mencapai 4,2% dan 4,8% jika sekitar 39% dari masyarakat sasaran telah diinokulasi pada September 2021. Angka tersebut tidak jauh berbeda dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Kementerian Keuangan 2021 sebesar 4,5% - 5,3% pada Februari lalu. Proyeksi ini akan bergantung pada berbagai kebijakan dan tindakan yang diambil Pemerintah dalam mengelola pemulihan pasca pandemi dan tekanan ekonomi global.

Pemerintah telah mengalokasikan ratusan triliun Rupiah untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional. Tugas Parlemen untuk memastikan alokasi dan distribusi anggaran dilakukan secara tepat sasaran. Parlemen juga harus memastikan program vaksinasi yang lebih cepat dan masif untuk meningkatkan kekebalan dan meningkatkan mobilitas masyarakat. Parlemen memiliki tugas untuk memastikan perlindungan sosial tetap pada tempatnya dan membantu mencegah peningkatan jumlah pengangguran dan orang miskin. Selain itu, parlemen harus memikirkan dan menciptakan cara agar perekonomian Indonesia

lebih tangguh di masa depan, baik dari segi tantangan alam seperti perubahan iklim maupun kerusakan akibat ulah manusia.



**Caron Gurhrie, OECD Public Affairs and Media**

**Carol Guthrie**, OECD Public Affairs and Media, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Virtual Exchange with the Authors of the 2021 Economic Survey of Indonesia. Indonesia merupakan key-partner OECD sejak 2007. OECD telah bekerjasama dalam berbagai forum dengan DPR RI melalui OECD Global Parliamentary Network yang dibentuk OECD sekitar satu dekade lalu.

**Andrea Goldstein**, Head of Indonesia Desk, OECD Economics Department didampingi **Robert Grundke**, Indonesia Desk Economist, memberikan paparan mengenai survei ekonomi Indonesia 2021. Survei ekonomi 2021 merupakan hasil dari OECD-Indonesia Joint Work Programme (JWP) 2019-2021. JWP mengkonsolidasikan kerja sama Indonesia dengan OECD yang sudah ada dan menambahkan prioritas strategis baru, termasuk pembiayaan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, memanfaatkan peluang transformasi digital, mempromosikan pariwisata berkelanjutan, serta menumbuhkan iklim bisnis dan investasi yang dinamis. Pengurangan kemiskinan, inklusivitas, dan keberlanjutan menjadi tema berkesinambungan di seluruh area kebijakan JWP untuk

mendukung upaya Indonesia dalam mengimplementasikan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. Secara umum survei ekonomi OECD tahun ini membawa nuansa optimis. Tetapi untuk dapat mencapai pembangunan ekonomi sesuai yang diharapkan, pengembangan SDM menjadi keharusan bagi Indonesia terutama karena Indonesia saat ini tengah menghadapi bonus demografi.

Survei OECD menyoroti tiga tema besar, yaitu langkah mitigasi COVID-19, perbaikan iklim usaha dan pelestarian lingkungan, investasi kompetensi dan keterampilan serta perluasan pasar tenaga kerja. Mengenai langkah-langkah mitigasi pandemi COVID-19, OECD merekomendasikan Indonesia untuk melanjutkan program bantuan sosial yang diarahkan untuk memberikan dukungan keuangan kepada rumah tangga dan bisnis untuk melindungi mata pencaharian dan pekerjaan, merencanakan konsolidasi fiskal dalam jangka menengah tetapi menghindari penghapusan stimulus yang prematur dan tiba-tiba, mempertahankan kebijakan moneter yang akomodatif selama inflasi terjaga sesuai target, dengan pedoman ke depan tentang normalisasi, meningkatkan pendapatan pajak, mengeliminasi perjanjian "pembagian beban" secara bertahap, serta terus meningkatkan independensi Bank Indonesia.

Mengenai perbaikan iklim usaha, OECD berfokus pada keseimbangan Negara dan pasar. Beberapa rekomendasi, yaitu peningkatan tata kelola BUMN untuk menyelaraskan dengan praktik terbaik global, menjamin kepatuhan BUMN pada hukum persaingan dan meminta pertanggung jawaban apabila ada penyalahgunaan posisi dominasi pasar yang dimiliki, meninjau batasan *Foreign Direct Investment* yang ada serta menghapus batasan yang menimbulkan biaya tanpa menghasilkan manfaat, dan memantau batasan lainnya, membatasi *direct awards* hanya untuk kebutuhan saat ini, mendesak dan tidak terduga, serta menjaga independensi dan kewenangan KPK untuk memastikan pencegahan, deteksi, dan investigasi korupsi yang efektif.

Mengenai pelestarian lingkungan, rekomendasi OECD mencakup melindungi dan merestorasi lahan gambut dan hutan serta meningkatkan sumber anggaran untuk lembaga perlindungan lingkungan, menetapkan harga karbon bahan bakar fosil, mempercepat investasi transportasi umum perkotaan dan mengupayakan integrasi antar moda, mengkonfirmasi rencana untuk mereformasi tarif pembelian, biaya pemulihan biaya dan meningkatkan porsi energi terbarukan dalam bauran energi.

### C. PARTISIPASI DELEGASI

Paparan OECD diikuti dengan sesi diskusi dan tanya jawab. **Pimpinan dan anggota BKSAP** mengajukan berbagai pertanyaan antara lain terkait isu ekonomi dan dinamika geopolitik kawasan, pemulihan sektor pariwisata, praktik cerdas negara-negara anggota OECD terkait usia 5 tahun untuk memulai pendidikan dasar, ekonomi hijau, serta peran BUMN dan kompetisi. Selain itu, pimpinan dan anggota BKSAP menanyakan prognosis OECD terkait ekonomi dan perdagangan internasional, pandangan OECD terkait UU Omnibus, rekomendasi untuk peningkatan nilai komoditas dan sumber daya alam Indonesia, serta rekomendasi mengenai daya saing siswa-siswa Indonesia terkait PISA.



**Anggota BKSAP, Syahrul Aidi Maazat (F-PKS), dan Asman Abnur (F-PAN) hadir pada briefing**

Merespon pertanyaan-pertanyaan tersebut, **Andrea Goldstein** menyampaikan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang telah sukses melewati berbagai turbulensi sebagai akibat dari dinamika kawasan maupun global. Dalam dua dekade terakhir, Indonesia telah melewati transisi menuju pemerintahan demokratis dan transisi menjadi negara berpendapatan menengah. Terkait isu dinamika kawasan yang saat ini tengah hangat yaitu pergolakan di Myanmar, Indonesia sebagai negara terkemuka di ASEAN dapat

mengambil posisi yang tepat untuk menjaga stabilisasi kawasan sekaligus menjaga prinsip *non-interference*.

Untuk pertanyaan mengenai pariwisata, pemulihan sektor pariwisata Indonesia dapat dimulai dari destinasi-destinasi wisata yang telah memiliki reputasi dunia seperti Bali. Sebagai mekanisme pengungkit dapat melalui insentif dan subsidi. Indonesia dapat pula melakukan *repositioning*, yaitu dengan memfokuskan pada pariwisata berbasis lingkungan.

Terkait penguatan peran BUMN dan keseimbangan dengan peran negara sebagai regulator, OECD menyampaikan rekomendasi, yaitu meningkatkan tata kelola BUMN untuk menyelaraskan dengan praktik terbaik global, serta meningkatkan kepatuhan BUMN pada hukum persaingan dan meminta pertanggungjawaban apabila ada penyalahgunaan posisi dominasi pasar yang dimiliki. Singapura merupakan salah satu negara di mana BUMN dapat memegang posisi pasar dominan tapi kompetisi tetap terjaga.



**Anggota BKSAP, Mochmad Ichsan Firdaus (F-PG), dan Adrian Jopie Paruntu (F-Golkar) hadir pada pada briefing OECD**

Secara global, dunia bergerak ke arah pemulihan ekonomi. Stimulus fiskal yang dilakukan Amerika Serikat di fase pemulihan ekonomi ini telah membawa *spillover* ke seluruh dunia. Indonesia dapat memainkan peran untuk memperbaiki sistem internasional, antara lain melalui WTO. Kepemimpinan Indonesia di G20 nanti dapat digunakan untuk membawa perbaikan pada sistem ekonomi internasional. Terkait pertanyaan apakah Indonesia akan mampu kembali pada batas defisit APBN 3 persen, secara umum OECD merasa optimis.

Mengenai UU Omnibus yang bagi banyak kalangan dinilai memberikan legitimasi untuk degradasi lingkungan, OECD berpendapat Indonesia dapat menerapkan konsep pembangunan ekonomi yang selaras dengan pelestarian lingkungan. Kerja sama Indonesia dengan Norwegia mengenai deforestasi merupakan salah satu contoh praktik cerdas yang dapat membantu Indonesia untuk menerapkan pembangunan hijau.

Terkait masukan mengenai rekomendasi OECD yang tidak menyentuh mengenai upaya penambahan nilai dan hilirisasi ekspor komoditas dan sumber daya alam, OECD menyampaikan bahwa dapat dilakukan pembenahan di dalam negeri sendiri. Pengurangan hambatan-hambatan *Foreign Direct Investment* (FDI) sehingga UMKM Indonesia dapat mengolah komoditas dan sumber daya alam, mampu bersaing di rantai pasok global dan regional. Upaya mendukung hilirisasi dapat dilakukan antara lain melalui dengan implementasi rekomendasi OECD untuk pengembangan SDM dan penguatan investasi infrastruktur guna mendukung logistik dan transportasi.

Terkait skor PISA Indonesia yang mengalami penurunan, OECD menilai terpenting adalah terdapat kemajuan dari sisi kualitas siswa.



#### **Dr. Fadli Zon menutup briefing bersama OECD secara virtual**

Agenda *Virtual Exchange* dengan OECD ditutup oleh Ketua BKSAP DPR RI, Dr. **Fadli Zon, S.S, M.Sc.** Dalam sambutan penutupan, Ketua BKSAP menyampaikan apresiasi pada OECD. Agenda hari ini membuktikan bahwa di negara demokratis parlemen berada pada level yang sama dengan pemerintah. DPR memiliki porsi yang cukup besar untuk menjadikan perekonomian lebih baik, lebih berkelanjutan, dan lebih tangguh. Rekomendasi OECD untuk terus mendukung peran KPK, penguatan implementasi Konvensi PBB Melawan Korupsi UNCAC dan menyelaraskan dengan OECD Anti-Bribery Convention tentunya sangat menarik bagi. Sebagai Ketua SEAPAC saat ini dan Presiden GOPAC sebelumnya, Ketua BKSAP melihat ada lebih banyak peluang bagi untuk kolaborasi di masa depan. Ketua BKSAP mendorong sesama anggota parlemen untuk memanfaatkan survei ini secara maksimal dalam pelaksanaan fungsi anggota parlemen. Agenda hari ini membuka jalan bagi kerjasama dan kemitraan dengan OECD di masa mendatang.



**Delegasi BKSAP DPR RI pada briefing bersama OECD**

### **III. PENUTUP**

#### **A. ANGGARAN**

Anggaran yang dipergunakan untuk mengikuti acara ini adalah sejumlah Rp. 250.563.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah).

#### **B. KETERANGAN LAMPIRAN**

Laporan ini dilengkapi oleh lampiran sebagai berikut:

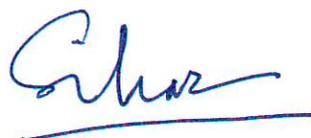
- *Paparan narasumber*
- *Dokumentasi*
- *Liputan media elektronik*

### C. KATA PENUTUP

Demikianlah pokok-pokok Laporan Kegiatan dalam rangka mengikuti OECD Briefing of Economic Survey Of Indonesia di Tangerang – Banten pada hari Selasa 23 Maret 2021. Dokumen mengenai sidang akan dijadikan lampiran. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Maret 2021

Ketua Delegasi,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sihar', with a horizontal line underneath it.

**Dr. Sihar P.H. Sitorus, BSBA., MBA**  
A-139

# BAHAN PAPARAN



# Survei Ekonomi OECD **INDONESIA**

Ringkasan eksekutif

Maret 2021



- **COVID-19 telah mengganggu pertumbuhan ekonomi yang telah berlangsung lama dan stabil dan mengakibatkan resesi**
- **Kinerja BUMN yang lebih baik menjadi kunci untuk meraih manfaat globalisasi**
- **Melindungi lingkungan demi manfaat bagi semua**
- **Membangun kompetensi demi pertumbuhan yang inklusif**

# Rekomendasi utama

## Beralih dari manajemen krisis menuju pencapaian pemulihan

- Perpanjang jangka waktu terhadap upaya memberikan bantuan finansial pada rumah tangga dan pelaku usaha guna melindungi mata pencaharian dan ketenagakerjaan.
- Tingkatkan koordinasi kebijakan antar kementerian dan antara berbagai tingkat pemerintahan, serta pastikan adanya konsistensi berbagai sistem akuntansi pemerintah.
- Otoritas sebaiknya merencanakan konsolidasi fiskal dalam jangka menengah, namun hindari pencabutan stimulus secara prematur dan mendadak.
- Upaya menaikkan penerimaan pajak perlu ditingkatkan, utamanya dengan cara: meningkatkan kepatuhan, memperluas basis pajak, menaikkan tarif pajak tertentu (misalkan cukai tembakau), meningkatkan kerja sama internasional, dan menutup celah perpajakan.
- Hapuskan secara bertahap kesepakatan burden sharing, seperti yang diharapkan.
- Kebijakan moneter perlu tetap akomodatif selama inflasi masih sesuai target, dengan mengarah menuju normalisasi seiring dengan perbaikan situasi.
- Independensi Bank Indonesia hendaknya perlu terus dijaga.

## Meningkatkan efektifitas intervensi pemerintah

- Tingkatkan tata kelola BUMN agar sejalan dengan praktik global.
- BUMN hendaknya selalu tunduk pada aturan persaingan usaha dan diminta pertanggungjawabannya apabila terjadi posisi dominannya di pasar.
- Lakukan peninjauan kembali atas batasan yang ada saat ini, hapuskan batasan yang menimbulkan biaya tanpa mendatangkan manfaat, dan pantau batasan yang tersisa.
- Batasi penunjukan langsung hanya untuk kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini juga, bersifat mendesak, dan tidak diduga, ketika hanya ada pemasok tunggal yang memenuhi kualifikasi, dan harus diakhir sesegera mungkin.
- Jaga independensi dan kewenangan KPK guna memastikan pencegahan, deteksi, dan investigasi korupsi secara efektif.

## Mempercepat transisi hijau

- Lakukan perlindungan, pembasahan kembali, dan restorasi hutan dan lahan gambut, serta tingkatkan anggaran untuk instansi perlindungan lingkungan hidup.
- Tetapkan harga karbon untuk bahan bakar fosil.
- Pastikan rencana untuk melakukan reformasi atas harga beli listrik (buy-in tariff), guna memungkinkan pengembalian biaya operasi (cost recovery).
- Percepat investasi pada transportasi publik dan upayakan integrasi antarmoda.

## Memperluas keterampilan dan kesejahteraan

- Pertimbangkan untuk menurunkan usia awal mulai wajib belajar.
- Tinjau kembali tingkat upah minimum wajib pada tiap provinsi agar lebih sesuai dengan karakteristik setempat.
- Dorong penyerapan tenaga kerja perempuan melalui kampanye publik. Targetkan lebih banyak perempuan yang mengikuti program pelatihan sepanjang hayat (lifelong). Dukung untuk memperbanyak fasilitas penitipan anak. Tegakkan aturan hukum terkait kesetaraan gender.
- Uji coba perlindungan kerja yang lebih rendah serta penurunan upah minimum bagi pekerja muda di kawasan ekonomi khusus. Bila hal ini berhasil, lakukan perluasan.
- Perluas skema asuransi pengangguran dengan diskusi bersama asosiasi pengusaha dan serikat pekerja.
- Lakukan lebih banyak investasi dalam infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk diajarkan di sekolah dasar dan menengah.

# COVID-19 telah mengganggu pertumbuhan ekonomi yang telah berlangsung lama dan stabil dan mengakibatkan resesi

Setelah mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan dan stabil selama dua dasawarsa terakhir, kehadiran pandemi memicu “badai yang sempurna”. Di tahun 2020, PDB mengalami kontraksi dan sebagian kerentanan Indonesia mengemuka, meskipun intervensi kebijakan luar biasa yang diambil dapat meredam kerusakan yang ditimbulkan.

**Resesi pada tahun 2020 terjadi secara luas.** Banyak sektor terkena dampaknya, dan ketidakpastian terkait perkembangan pandemi serta tertekannya tingkat keyakinan membuat investasi dan konsumsi tertahan, kecuali untuk beberapa sektor, seperti sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan layanan kesehatan. Turunnya permintaan global membebani sektor komoditas, sekalipun terlihat perbaikan pada semester kedua. Sektor konstruksi turut terkena imbas, seiring dengan terjadinya penundaan berbagai proyek infrastruktur.

**Dampak sosial yang terjadi cukup berat.** Tenaga kerja formal turun, dan krisis yang terjadi sangat mempengaruhi kelompok-kelompok rentan seperti pekerja informal, pekerja migran dalam negeri, perempuan, dan anak-anak. Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi dampak buruk yang timbul sekaligus meningkatkan keahlian penduduk.

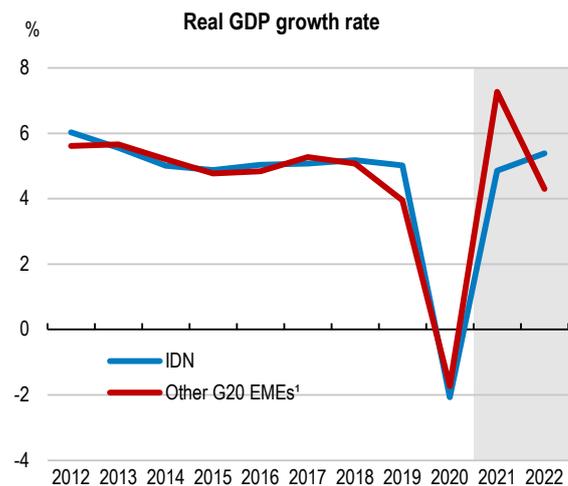
**Sistem kesehatan turut mengalami tekanan, namun kolaps berhasil dihindari.** Berbagai upaya ekstra dilakukan guna menangani wabah COVID-19, dan sistem yang ada terbukti lebih kokoh dari yang diperkirakan, meski angka kematian pada pasien dalam pengawasan serta pada kalangan dokter dan perawat tergolong tinggi, dan sistem pelacakan kontak (tracing) masih sangat terbatas. Migrasi pekerja kesehatan profesional juga cukup mengkhawatirkan. Ke depannya, penting untuk terus melanjutkan upaya pemberantasan berbagai jenis penyakit lain, seperti tuberkulosis, demam berdarah, dan malaria, yang masih banyak terjadi.

**Pemulihan akan bertahap, dengan risiko penurunan yang cukup besar.** Dengan tidak adanya tanda yang jelas bahwa virus akan surut, muncul ketidakpastian terkait penarikan semua tindakan pencegahan dan mitigasi, serta atas keberhasilan penyelenggaraan program vaksinasi gratis. Meskipun ketergantungan pada perdagangan elektronik semakin meningkat, konsumsi swasta akan membutuhkan waktu untuk kembali ke tingkat sebelum krisis karena hilangnya pendapatan. Tingkat pertumbuhan investasi diperkirakan akan tetap lemah, meskipun UU Cipta Kerja

(UU Omnibus) yang baru diharapkan dapat memperbaiki iklim usaha. Pertumbuhan perdagangan global yang lambat juga akan berdampak buruk terhadap investasi.

## Gambar 1. Pertumbuhan yang berhenti mendadak

Tingkat pertumbuhan PDB, % perubahan tahunan (y-o-y)



1. Negara EME G20 lainnya meliputi Argentina, Brasil, Tiongkok, India, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, dan Turki.

Sumber: basis data OECD Economic Outlook 108.



**Tabel 1. Perekonomian mengalami kontraksi**

(tingkat pertumbuhan tahunan, kecuali dinyatakan lain)	2019	2020	2021	2022
<b>Produk Domestik Bruto (PDB)</b>	5.0	- 2.1	4.9	5.4
Konsumsi rumah tangga	5.2	- 2.7	3.6	7.1
Konsumsi pemerintah	3.3	1.9	- 0.3	1.0
Pembentukan modal tetap bruto	4.5	- 4.9	2.0	6.0
Ekspor barang dan jasa	- 0.9	- 7.7	2.0	3.9
Impor barang dan jasa	- 7.4	- 14.7	1.8	7.4
Tingkat pengangguran (% angkatan kerja)	5.3	8.0	6.8	5.8
Indeks harga konsumen	3.0	1.9	2.1	3.0
Neraca fiskal (% PDB)	- 2.2	- 6.5	- 5.7	- 4.1
Utang publik (% PDB)	26.3	27.0	35.0	38.6

Sumber : OECD Economic Outlook 108 database updated.

#### **Kebijakan fiskal yang dikeluarkan sudah bersifat ekspansif, terlepas dari kendala formal yang ada.**

Batasan defisit fiskal (3% PDB) untuk sementara. Lambatnya penyerapan anggaran di tahap awal membatasi dampak stimulus fiskal yang besarnya mencapai 4,3% PDB di tahun 2020, namun situasi ini kemudian membaik dengan dilakukannya percepatan belanja. OECD memproyeksikan rasio defisit anggaran terhadap PDB akan turun dari 6,5% di tahun 2020 menjadi 5,7% di tahun 2021. Sokongan lebih lanjut dalam jangka menengah akan bergantung pada kemudahan akses ke pasar uang yang perlu terus dijaga, serta peningkatan penerimaan pajak yang lebih besar dimana pada saat ini masih belum memadai.

**Kebijakan moneter tetap akomodatif.** Di tahun 2020 Bank Indonesia memangkas suku bunga acuan hingga lima kali, dan kembali menurunkannya di bulan Februari 2021, dengan total mencapai 150 basis poin. Pelonggaran likuiditas (quantitative easing) serta berbagai upaya makroprudensial telah dijalankan demi memperbesar likuiditas. Inflasi diperkirakan akan tetap rendah, dan kebijakan moneter yang bersifat akomodatif, diiringi dengan arahan ke depan, perlu terus dilanjutkan.

**Bank sentral terlibat dalam skema “berbagi beban” atau “burden sharing” dengan pemerintah.** Bank Indonesia membeli obligasi pemerintah secara langsung, dengan menanggung biaya bunga. Hal ini sejalan dengan mandat bank sentral dalam stabilisasi ekonomi makro, dan langkah-langkah pengaman yang sesuai sudah dilakukan. Ke depan, akan penting untuk menjaga kejelasan terkait batasan antara kebijakan fiskal dan moneter, serta menjaga independensi Bank Indonesia.

#### **Beberapa indikator keuangan perlu diperhatikan.**

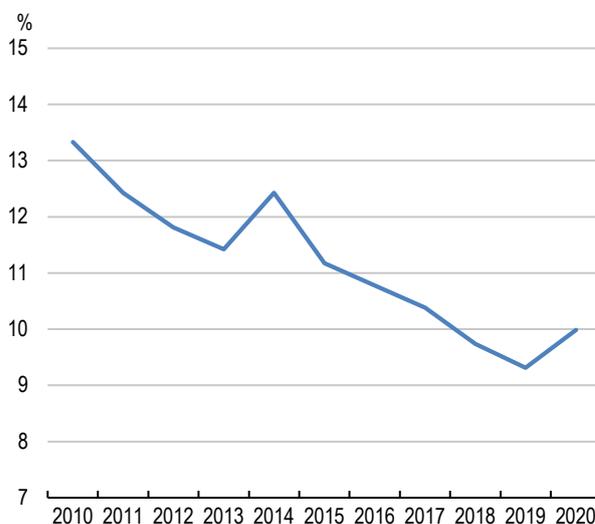
Tekanan pasar terbesar terjadi pada Maret 2020. Sejak itu, kondisi telah membaik, namun adanya utang perusahaan dalam mata uang asing memberikan risiko terhadap stabilitas keuangan. Meskipun belum lama ini telah dilakukan upaya penguatan nilai tukar, selisih terhadap berbagai nilai patokan global masih belum kembali ke tingkat sebelum terjadinya krisis. Turunnya defisit neraca berjalan memberikan sinyal positif dalam hal berkurangnya kerentanan, namun sentimen investor terhadap pasar negara berkembang (emerging markets) masih mudah berubah, dan pemburukan mendadak akan memicu siklus depresiasi/inflasi dan menghambat akses pasar.

#### **Kemajuan dalam pengurangan kemiskinan juga menghadapi risiko.**

Sejak memasuki abad baru, tingkat kemiskinan menurun namun kembali merambat naik, bahkan sebelum terjadinya pandemi (Gambar 2). Pola konsumsi, khususnya untuk barang tahan lama, menunjukkan adanya kenaikan kelas menengah. Namun demikian, proporsi orang Indonesia yang mapan secara ekonomi hanyalah sepertiga, dan tiga dari sepuluh orang di wilayah perkotaan masih tinggal di kawasan kumuh. Kemiskinan masih tersebar luas di daerah perdesaan, dan tingkat pengangguran di kalangan pemuda merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara. Sebelum pandemi, lebih dari 26 juta orang (9,8% penduduk) tergolong miskin, dan di masa pandemic angka ini bisa bertambah sebesar 10 juta orang.

**Gambar 2. Tingkat kemiskinan kembali naik**

Banyaknya penduduk miskin dibandingkan dengan total penduduk



Sumber: BPS.



## Peningkatan Kinerja BUMN merupakan kunci dalam meraih manfaat globalisasi

BUMN diberi peran sentral untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju. BUMN menikmati kondisi operasional yang menguntungkan namun kinerjanya tidak merata, dan peningkatan utang BUMN mencerminkan adanya risiko fiskal tersembunyi.

**Meskipun minim privatisasi berskala besar, namun masih terdapat ruang untuk perbaikan bagi BUMN.** Tata kelola perusahaan perlu ditingkatkan, dan direksi serta manajemen perlu bebas dari campur tangan pemerintah. Pembentukan induk usaha BUMN di tingkat sektoral bisa memberikan manfaat, selama perusahaan yang beroperasi diberi mandat yang jelas dan melakukan pelaporan keuangan dengan transparan.

**Intensitas perdagangan menurun, dan ekspor masih terkonsentrasi pada sumber daya alam.** Meskipun perdagangan dengan negara berkembang lain di Kawasan Asia (Emerging Asia) semakin meningkat, Indonesia tidak banyak ambil bagian dalam rantai nilai (value chain) di tingkat regional, dan besarnya hambatan regulasi dan ketidakpastian hukum mengurungkan niat investor asing.

**Berbagai kesepakatan penting dan komprehensif membuka banyak peluang baru.** Kerja Sama Kemitraan Komprehensif Regional di Bidang Ekonomi (Regional Comprehensive Economic Partnership), Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (Indonesia-

Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement), dan kemungkinan kesepakatan dengan Uni Eropa dan EFTA akan memudahkan aliran barang, jasa, investasi, dan orang antara Indonesia dengan sejumlah mitra utamanya. Akses pasar preferensial berpotensi menguntungkan para eksportir, yang mana hal ini harus diikuti dengan kemajuan dalam fasilitasi perdagangan, kualitas produk, dan hal-hal lainnya.

**Meski terdapat kemajuan pada infrastruktur transportasi, namun masih terdapat kekurangan dalam hal keamanan dan logistik.** Kecelakaan transportasi darat dan laut tergolong tertinggi di Asia, dan demikian pula halnya dengan biaya logistik. Untuk mengisi kekurangan infrastruktur demi memperoleh manfaat globalisasi, diperlukan sumber daya finansial yang signifikan, dan hal tersebut diharapkan lebih banyak diperoleh dari investor swasta, termasuk dari luar negeri. Lembaga Pengelola Investasi (sovereign wealth fund) yang baru dibentuk dapat memainkan peran fasilitasi.

## Melindungi lingkungan demi manfaat bagi semua

Upaya memenuhi Komitmen Kontribusi Nasional (NDC) pada Kesepakatan Paris serta upaya mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) memerlukan kebijakan yang ambisius dalam rangka mobilisasi tambahan sumber daya keuangan dan teknologi.

**Penggunaan lahan dan penggundulan hutan turut andil menjadikan Indonesia sebagai salah satu penghasil gas rumah kaca terbesar di dunia.** Perpanjangan kebijakan moratorium atas pembukaan hutan primer dan lahan gambut, serta perubahan fungsinya, sekaligus perluasan lingkup kebijakan dengan memasukkan hutan sekunder, dapat menjadi potensi terbesar dalam upaya mitigasi.

**Upaya penurunan emisi gas rumah kaca sulit dipisahkan dengan pertumbuhan ekonomi, dan pemenuhan target pengurangan emisi merupakan tantangan yang berat.** Dalam rangka menanggulangi pencemaran udara khususnya di Jakarta dan di kota-kota satelitnya, diperlukan penguatan (investasi) di bidang transportasi publik dan teknologi emisi-rendah, serta perbaikan efisiensi energi. Di banyak tempat, pencemaran akibat sampah plastik masih menjadi tantangan utama, baik di darat maupun di laut. Di masa pascakrisis, tindakan pemerintah dan pelaku usaha dapat berperan penting dalam mempercepat transisi ke arah yang lebih ramah lingkungan.

## Membangun kompetensi demi pertumbuhan yang inklusif

Aspek kependudukan telah banyak mendukung, namun peluang ini hampir usai.

**Indonesia telah menikmati “bonus demografi”,** yang mendukung pertumbuhan PDB per kapita. Besarnya populasi usia kerja diperkirakan akan mencapai puncaknya di tahun 2021, yang akan tetap stabil dalam waktu sepuluh tahun, dan kemudian turun perlahan.

**Sasaran pertumbuhan ekonomi untuk 25 tahun ke depan sangat ambisius.** Dalam jangka menengah, RPJMN 2020-2024 menetapkan sasaran pertumbuhan PDB antara 5,4% dan 6%, sehingga dalam jangka Panjang Indonesia bisa menjadi negara maju pada tahun 2045 – saat perayaan kemerdekaan RI ke-100 tahun.

**Capaian bidang pendidikan sudah sangat meningkat dalam dua dasawarsa terakhir, namun COVID-19 meningkatkan risiko ketidakhadiran dan putus sekolah.** Perbaikan efisiensi belanja publik dan usia mulai bersekolah yang lebih dini dapat meningkatkan capaian pendidikan dan prestasi belajar. Investasi yang lebih besar di bidang TIK akan membantu untuk mendapatkan manfaat dari digitalisasi.

**Masih terdapat kekurangan dalam hal keahlian, dan hal ini mengkhawatirkan sehubungan dengan kebutuhan saat ini dan di masa mendatang.** Kepastian adanya kecukupan keterampilan menjadi semakin penting seiring dengan perekonomian yang





semakin berbasis pengetahuan. Pendidikan kejuruan dan pelatihan sepanjang hayat (lifelong) perlu terus didorong agar tenaga kerja mampu meningkatkan kemampuan mereka dengan upskilling dan reskilling, dengan peran lebih besar bagi mitra-mitra sosial.

**Meningkatkan lapangan kerja menjadi penting untuk mengantisipasi akhir dari bonus demografi.**

Partisipasi yang lebih besar dari perempuan, pekerja migran dalam negeri, diaspora yang kembali ke tanah air, pekerja asing, dan kelompok yang kurang beruntung sangat diperlukan.

**Reformasi peraturan di bidang ketenagakerjaan bertujuan membantu para pencari kerja.** UU Cipta Kerja yang belum lama ini disahkan mendorong penyerapan tenaga kerja di perekonomian formal, menghapuskan biaya pemberhentian pekerja, dan memperkenalkan sistem berbasis risiko sebagai dasar pemberian persetujuan atas proyek-proyek yang sensitif terhadap lingkungan. Peraturan pelaksana sangat

penting untuk mencapai hasil yang diharapkan, dan perlu dikonsultasikan dengan para pemangku kepentingan terkait.

**Mendorong persaingan, menyederhanakan aturan usaha, dan melakukan modernisasi sektor keuangan akan meningkatkan produktivitas.**

Banyak aturan anti-persaingan usaha yang menghambat kewirausahaan. Terdapat ruang untuk menyempurnakan kerangka peraturan, misalnya dengan menghilangkan aneka pembatasan yang tidak perlu terkait masuknya perusahaan asing multinasional.

**Korupsi tetap menjadi masalah utama.** Perombakan lembaga pemberantasan korupsi memunculkan tantangan baru, dan independensi lembaga tersebut perlu dijaga. Dengan dialokasikannya sejumlah besar dana untuk kegiatan pemulihan dari pandemi, perlu untuk memastikan norma dan praktik pengadaan publik diberlakukan secara ketat.



## Survei Ekonomi OECD

# INDONESIA

Indonesia, untuk pertama kalinya dalam dua puluh tahun terakhir, mengalami resesi pada tahun 2020, meskipun stimulus fiskal berskala besar dan dukungan moneter berhasil membatasi dampak dan kedalaman resesi tersebut. Dikeluarkannya paket reformasi struktural yang ambisius, yang mencakup aturan ketenagakerjaan, perpajakan, dan kemudahan berusaha, menunjukkan komitmen pemerintah untuk menarik investasi yang berkualitas yang akan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan. Hal ini menjadi penting di masa-masa ketika Indonesia memasuki liberalisasi perdagangan dan investasi melalui Kerja Sama Kemitraan Komprehensif di Bidang Ekonomi di Tingkat Regional (Comprehensive Economic Partnership) dengan negara-negara di Asia Timur dan Oseania, dengan berbagai peluang dan tantangan baru. Namun demikian, pandemi ini meninggalkan tantangan yang cukup berat. Dampak COVID-19 memperberat tantangan yang sudah ada sebelum pandemi, khususnya terkait tingginya tenaga kerja informal dan tingkat keterampilan kerja yang relatif rendah. Ketidakpastian pelaksanaan program vaksinasi dan kembalinya warga ke kehidupan normal, khususnya bagi anak-anak yang tidak bersekolah dalam waktu cukup lama. Krisis ini akan membawa dampak yang berlangsung lama pada beberapa sektor sosial-ekonomi yang rentan, dan oleh karenanya memerlukan peningkatan pada pemberian layanan sosial.

### **FITUR KHUSUS: KETERAMPILAN**

[oe.cd/indonesia](https://oe.cd/indonesia)

#### **Photo Credits:**

© Shutterstock/Kalilipatvideoart (Cover )  
@ Shutterstock/ (p.3) Agungky  
@ Shutterstock/ (p.5) Didik Setiawan  
@ Shutterstock/ (p.6) Arief Akbar  
@ Shutterstock/ (p.7) Steve Photography  
@ Shutterstock/ (p.7) Sirisak\_baokaew

**BERITA**



# Sihar Sitorus: OECD Berikan Perspektif Internasional Menuju Pemulihan

24-03-2021 / B.K.S.A.P.



*Wakil Ketua BKSAP DPR RI Sihar Sitorus. Foto: Aisyah/rni*

Resesi pada tahun 2020 terjadi secara luas mengakibatkan banyaknya sektor yang terkena dampaknya. Ketidakpastian terkait perkembangan pandemi serta tertekannya tingkat keyakinan membuat investasi dan konsumsi tertahan kecuali untuk beberapa sektor, seperti sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan layanan kesehatan.

BKSAP (Badan Kerja Sama Antar Parlemen) DPR RI melakukan pertemuan secara virtual dengan OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) untuk menerima laporan hasil survei terkait kondisi ekonomi di Indonesia khususnya pada masa pandemi Covid-19.

Pertemuan yang dipimpin oleh Wakil Ketua BKSAP DPR RI Sihar Sitorus ini dilaksanakan di Tangerang, Banten, Selasa (23/11/2021). Sihar mengatakan, OECD memberikan rekomendasi yang menarik untuk legislasi dan eksekutif ke depannya dalam pemulihan ekonomi.

Menurut Sihar, ada tiga kelompok besar yang di sampaikan oleh OECD. Pertama tentang kinerja makro ekonomi Indonesia, kemudian tentang iklim usaha (iklim bisnis), yang ketiga tentang *Human Capital*. Ia juga menyampaikan bahwa OECD memberikan rekomendasi mengenai langkah-langkah apa kedepan yang harus diambil oleh pemerintah Indonesia.

“Saya pikir beberapa rekomendasi itu sangat menarik untuk ditelaah lebih jauh sebagai bahan bagi kita yang di DPR RI untuk memformulasi pikiran-pikiran kita untuk menghasilkan legislasi atau memberikan rekomendasi kepada eksekutif yaitu kementerian-kementerian yang menjadi mitra DPR RI.” ucap Sihar, usai pertemuan.

Politisi PDI Perjuangan ini menuturkan, sejak adanya covid, banyak parameter- parameter yg turun. Namun setelah tracing dan vaksinasi dilakukan, keyakinan masyarakat mulai kembali dan bisa terlihat pergerakan ekonomi juga sudah mulai bergeliat. “Itu pun tetap didukung oleh kebijakan-kebijakan yang diambil oleh BI maupun kementerian keuangan.” jelasnya.

Sihar menyatakan, melalui paparan OECD ini BKSAP DPR memiliki perspektif internasional mengenai masalah-masalah yang ditemukan sehari-hari, seperti keterbukaan investasi asing, sehingga *green economy* perlu di dorong lebih jauh lagi.

“Ini suatu momentum bagi Indonesia untuk mengejar digitalisasi, mengejar *green economy*, mengejar perbaikan-perbaikan yang mengangkat, mengurangi kemiskinan yang ada di Indonesia,” jelasnya mengakhiri. (ais/er)

